

LAPORAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
Tahun 2026

Alamat : Jl. Brigjen Katamso No. 11 Telp (0536) 3224547
email : bp3akkb.kalteng@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 ini dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama tahun anggaran 2025.

Penyusunan laporan evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat capaian kinerja pelaksanaan Renja, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ke depan. Evaluasi ini juga menjadi dasar penting dalam proses penyusunan perencanaan tahun berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, serta penguatan program keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik dari internal perangkat daerah maupun pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan evaluasi ini. Kami juga menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana di Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Maret 2026

**Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah**



**dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717 199003 2 006**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.4 Ruang Lingkup.....	3
1.5 Metodologi Evaluasi	4
1.6 Sistematika Penulisan Laporan.....	5
BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025	6
2.1 Visi dan Misi Renja Tahun 2025.....	6
2.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai Renja Tahun 2025	8
2.3 Target Kinerja Renja Tahun 2025	11
BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2025	20
3.1 Evaluasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2025	20
3.2 Faktor Pendorong	24
3.3 Evaluasi Penghambat.....	24
3.4 Tindak Lanjut Penyelesaian Faktor Penghambat	25
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Tingkat Capaian Kinerja Renja Tahun 2025	26
4.2 Kesimpulan dan Rencana Tindak Lanjut Perencanaan Berikutnya	26

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, indikator kinerja, serta target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran daerah.

Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi, seperti Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam implementasinya, berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi ini penting dilakukan guna memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, mengukur capaian indikator kinerja, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang tersedia dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Melalui evaluasi tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja Perangkat Daerah selama Tahun 2025, baik dari sisi realisasi program dan kegiatan, pencapaian target indikator kinerja, maupun kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Hasil evaluasi ini selanjutnya akan menjadi bahan masukan penting dalam penyempurnaan proses perencanaan pembangunan pada periode berikutnya, khususnya dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun selanjutnya agar lebih realistis, terarah, dan akuntabel.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu disusun Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah serta

sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah di masa yang akan datang.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.
6. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/253/2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
7. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
2. Menilai kesesuaian antara perencanaan program dan kegiatan dengan realisasi pelaksanaannya selama Tahun 2025.
3. Mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
4. Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

5. Menyediakan bahan evaluasi dan masukan bagi perbaikan perencanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran, terukur, dan akuntabel.

Adapun manfaat dari penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi bahan informasi mengenai capaian kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025.
2. Menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan pada Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
3. Menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penentuan kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien.
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Mendukung peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah secara berkelanjutan.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Evaluasi Capaian Kinerja Renja Tahun 2025

Evaluasi capaian kinerja Renja Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Perangkat Daerah selama satu tahun anggaran. Evaluasi ini mencakup pengukuran terhadap realisasi indikator kinerja, baik dari sisi output maupun outcome, serta kesesuaian antara target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Melalui evaluasi ini dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, sekaligus memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya.

2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan berbagai kondisi dan unsur yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2025. Faktor tersebut dapat berupa dukungan kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, komitmen pimpinan dan aparatur, koordinasi yang baik antar unit kerja, serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Keberadaan faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi positif terhadap

kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target kinerja yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal.

3. Evaluasi Penghambat

Evaluasi penghambat dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2025. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, maupun kendala dalam proses administrasi dan koordinasi. Selain itu, hambatan juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perubahan kebijakan, kondisi sosial ekonomi, maupun faktor lainnya yang berada di luar kendali Perangkat Daerah. Identifikasi terhadap faktor penghambat ini penting untuk mengetahui akar permasalahan sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan yang tepat.

4. Tindak Lanjut Penyelesaian Faktor Penghambat

Tindak lanjut penyelesaian faktor penghambat merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2025. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi antar unit kerja, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya tindak lanjut yang terencana dan sistematis, diharapkan berbagai hambatan yang terjadi dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

1.5. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Evaluasi terhadap Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 adalah metode evaluasi kinerja dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Renja dengan realisasi capaian kinerja selama Tahun 2025. Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, baik faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Proses evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, analisis capaian kinerja, serta perumusan rekomendasi perbaikan. Data yang digunakan dalam evaluasi ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan kegiatan, laporan kinerja perangkat daerah,

serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025.

Analisis evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, dilakukan pula identifikasi terhadap faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan serta faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil dari analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kualitas perencanaan serta pelaksanaan program pada tahun berikutnya.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penyusunan laporan evaluasi Renja Tahun 2025, dasar hukum yang melandasi penyusunan laporan, tujuan dan manfaat evaluasi, ruang lingkup evaluasi, metodologi evaluasi yang digunakan, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025

Bab ini menjelaskan gambaran umum kebijakan yang menjadi dasar penyusunan dan pelaksanaan Renja Tahun 2025. Uraian dalam bab ini meliputi arah kebijakan pembangunan, prioritas program dan kegiatan perangkat daerah, serta keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.

BAB III EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2025

Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025 yang meliputi tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, analisis terhadap faktor pendorong keberhasilan, evaluasi terhadap faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, serta langkah tindak lanjut dalam penyelesaian berbagai kendala yang dihadapi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan proses perencanaan dan pelaksanaan program pada periode perencanaan berikutnya.

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN RENJA TAHUN 2025

2.1. VISI DAN MISI RENJA TAHUN 2025

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :

“Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Mangkatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”.

MISI :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
2. Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan yang inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
3. Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
4. Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat sebagai keadilan sosial
5. Pemberdayaan keadilan local dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045

Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

- a. Misi Kedua : “Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat”
- b. Misi Keempat : “Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial”
- c. Misi Kelima :” Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b. Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c. Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e. Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan local Falsafah Huma betang (Rumah Besar) Pokok Misi keempat dirumuskan sebagai berikut:
 - Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman Pancasila dan cinta damai
 - Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;
- b. Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- c. Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.
- d. Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri; Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan

dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 3.2 berikut ini

2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2025 PD

RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah diterjemahkan dari visi dan misi Kepala Daerah Terpilih untuk periode 2025 – 2029 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagaimana pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis SKPD.

Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang Gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah mengacu pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, khususnya terkait dengan prioritas Pembangunan daerah. Secara ringkas Substansi Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Adalah sebagai berikut :

Visi " Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga sejahtera dan berkualitas di Provinsi Kalimantan Tengah".

Sejalan dengan visi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan
2. Meningkatkan Perlindungan terhadap perempuan dan anak
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan program keluarga berencana

A. Tujuan

Tujuan merupakan kondisi yang ingin diwujudkan oleh DP3APPKB pada 5 (lima) tahun mendatang, dimana tujuan tersebut selaras dengan visi dan misi. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan pada hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 - 2029 dirumuskan sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Tujuan 1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| Tujuan 2 | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan |
| Tujuan 3 | Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak |
| Tujuan 4 | Meningkatkan kualitas data gender dan anak |
| Tujuan5 | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Tujuan 6 | Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera |

B. Sasaran

Berdasarkan perumusan tujuan strategis DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis dapat dirinci sebagai berikut :

- | | |
|----------|---|
| Tujuan 1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam pembangunan |
| | Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “Meningkatnya Implementasi pengaursutamaan Gender” yang ditandai dengan: |

- a. Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
 - b. Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga
 - c. Persentase perempuan di lembaga legislatif
 - d. Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- Tujuan 2 Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO” yang ditandai dengan:
- a. Rasio kekerasan terhadap perempuan da TPPO
- “Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO” yang ditandai dengan:
- a. Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
- Tujuan 3 Meningkatkan kualitas perlindungan khusus terhadap Anak
- Untuk mencapai tujuan di atas, ada 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
- “Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak” yang ditandai dengan:
- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - b. Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama
 - c. Rasio anak korban kekerasan
- “Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak” yang ditandai dengan:
- a. Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
- Tujuan 4 Meningkatkan kualitas data gender dan anak
- Untuk mencapai tujuan di atas sasaran strategisnya yaitu: “Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak” yang ditandai dengan:
- a. Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak
- Tujuan 5 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya sebagai berikut:
- “Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran” yang ditandai dengan:
- a. Hasil Penilaian SAKIP

- Tujuan 6 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera
- Untuk mencapai tujuan di atas, sasaran strategisnya adalah dengan :
- “Menurunnya angka kelahiran, Ketahanan Keluarga dan Stunting ” yang ditandai dengan:
- a. Angka Kelahiran Total/ Total Fertility Rate (TFR)
 - b. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR)
 - c. Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
 - d. Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)
 - e. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)

2.3. TARGET KINERJA RENJA TAHUN 2025

Target kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Target tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penetapan target kinerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan target kinerja Renja Tahun 2025, perangkat daerah menetapkan berbagai indikator kinerja yang mencerminkan hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja tersebut disusun secara spesifik, terukur, dan realistis sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun berjalan. Dengan adanya target kinerja yang jelas, diharapkan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja perangkat daerah.

Target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 selanjutnya menjadi acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Melalui pencapaian target kinerja tersebut diharapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang optimal serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 1.

Target Kinerja Renja Tahun 2025

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.08	URUSAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				16.728.239.977,35	15.916.656.647,62	15.488.725.929,62	14.221.608.490,17
02.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (%)	100	%	14.130.252.102,35	13.782.204.393,61	12.821.023.711,61	11.393.260.654,16
2.08.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	%	228.501.248,67	150.795.249,00	209.250.406,66	291.871.531,66
2.08.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	22.153.700,00	22.153.700,00	22.153.700,00	22.153.700,00
2.08.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	1	Dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2.08.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan	21.135.246,67	21.135.247,00	21.135.246,67	21.135.246,67
2.08.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	umlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	165.212.302,00	87.506.302,00	145.961.459,99	228.582.584,99
2.08.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	9.450.363.034,00	9.450.363.034,00	9.450.363.034,00	8.418.690.394,55
2.08.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Orang/Bulan	9.409.336.769,00	9.409.336.769,00	9.409.336.769,00	8.377.664.129,55
2.08.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	5.161.500,00	5.161.500,00	5.161.500,00	5.161.500,00
2.08.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	35.864.765,00	35.864.765,00	35.864.765,00	35.864.765,00
2.08.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	%	23.488.400,00	23.488.400,00	43.488.400,00	43.488.400,00
2.08.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12	Dokumen	23.488.400,00	23.488.400,00	43.488.400,00	43.488.400,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00
2.08.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	15.000.000,00
2.08.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	1.069.082.911,68	798.741.203,00	1.144.034.680,95	866.413.555,95
2.08.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	22.295.000,00	22.295.000,00	54.818.000,00	37.818.000,00
2.08.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	355.167.000,00	355.167.000,00	156.221.827,00	156.221.827,00
2.08.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	52.600.000,00	52.600.000,00	62.835.500,00	62.835.500,00
2.08.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Dokumen	28.636.894,20	28.636.894,00	72.789.818,00	72.789.818,00
2.08.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	515.359.417,48	245.017.709,00	658.544.935,95	397.923.810,95
2.08.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Laporan	95.024.600,00	95.024.600,00	138.824.600,00	138.824.600,00
2.08.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	1.038.415.000,00	1.038.415.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
2.08.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	Unit	871.015.000,00	871.015.000,00	23.800.000,00	23.800.000,00
2.08.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	167.400.000,00	167.400.000,00	-	0
2.08.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1.876.627.608,00	1.876.627.608,00	1.487.263.290,00	1.314.763.290,00
2.08.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	11.248.700,00	11.248.700,00	11.248.700,00	11.248.700,00
2.08.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	246.367.908,00	246.367.908,00	192.214.985,00	192.214.985,00
2.08.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.619.011.000,00	1.619.011.000,00	1.283.799.605,00	1.111.299.605,00
2.08.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	407.773.900,00	407.773.900,00	426.823.900,00	419.233.482,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Unit	142.296.400,00	142.296.400,00	161.346.400,00	161.346.400,00
2.08.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	50.735.200,00	50.735.200,00	50.735.200,00	50.735.200,00
2.08.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	214.742.300,00	214.742.300,00	214.742.300,00	207.151.882,00
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	35	Orang	949.722.360,02	882.618.739,00	1.432.618.739,02	1.482.618.739,02
2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	120.374.002,02	94.090.381,00	94.090.381,02	144.090.381,02
2.08.02.1.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	25	Kebijakan	48.356.000,00	38.145.621,00	38.145.621,00	38.145.621,00
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	9	Laporan	38.495.000,00	38.495.000,00	38.495.000,00	88.495.000,00
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1	Dokumen	33.523.002,02	17.449.760,00	17.449.760,02	17.449.760,02
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	812.254.998,00	774.234.998,00	1.324.234.998,00	1.324.234.998,00
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang Keluaran politik, hukum, sosial dan ekonomi	5	Orang	711.514.000,00	708.014.000,00	1.258.014.000,00	1.258.014.000,00
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik,	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi	3	Lembaga	100.740.998,00	66.220.998,00	66.220.998,00	66.220.998,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi						
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	17.093.360,00	14.293.360,00	14.293.360,00	14.293.360,00
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Perempuan Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	30	Orang	17.093.360,00	14.293.360,00	14.293.360,00	14.293.360,00
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan	90	%	455.591.583,00	363.026.583,00	363.026.583,00	423.026.583,00
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	1	Dokumen	96.237.533,00	54.813.533,00	54.813.533,00	54.813.533,00
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	9	Dokumen	19.316.038,00	8.994.038,00	8.994.038,00	8.994.038,00
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	9	Perangkat Daerah	76.921.495,00	45.819.495,00	45.819.495,00	45.819.495,00
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	1	Dokumen	226.641.000,00	187.668.000,00	187.668.000,00	247.668.000,00
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	50	Orang	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00	86.000.000,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	85	Layanan	140.641.000,00	101.668.000,00	101.668.000,00	161.668.000,00
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	Dokumen	132.713.050,00	120.545.050,00	120.545.050,00	120.545.050,00
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	25	Orang	113.197.000,00	101.029.000,00	101.029.000,00	101.029.000,00
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik	100	Orang	19.516.050,00	19.516.050,00	19.516.050,00	19.516.050,00
02.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Jumah peserta Pelatihan Usaha Perempuan Korban Kekerasan	90 Orang	Orang	5.634.940,00	5.634.940,00	5.634.904,00	5.634.904,00
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kab/kota yang membentuk forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	12	Kab/Kota	5.634.940,00	5.634.940,00	5.634.904,00	5.634.904,00
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	5.634.940,00	5.634.940,00	5.634.904,00	5.634.904,00
02.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dokumen hasil program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	13	Dokumen	105.325.611,00	60.889.611,00	60.889.611,00	60.889.611,00
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	Dokumen	105.325.611,00	60.889.611,00	60.889.611,00	60.889.611,00
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	1	Dokumen	31.956.518,00	14.584.518,00	14.584.518,00	14.584.518,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	1	Dokumen	73.369.093,00	46.305.093,00	46.305.093,00	46.305.093,00
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria KLA	10	Kab/Kota	288.313.810,00	199.707.810,00	182.957.810,00	158.603.428,00
2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Persentase Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	71,42	%	103.527.361,00	102.687.361,00	85.937.361,00	85.937.361,00
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	25.742.995,00	25.742.995,00	25.742.995,00	25.742.995,00
2.08.06.1.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	25	Perangkat Daerah	77.784.366,00	76.944.366,00	60.194.366,00	60.194.366,00
2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	1	Dokumen	184.786.449,00	97.020.449,00	97.020.449,00	72.666.067,00
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	30	orang	140.693.240,00	93.173.240,00	93.173.240,00	68.818.858,00
2.08.06.1.02.0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1	Kegiatan	44.093.209,00	3.847.209,00	3.847.209,00	3.847.209,00
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Peningkatan Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan (%)	60	%	793.399.570,98	622.574.570,99	622.574.570,99	697.574.570,99
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	1	Dokumen	314.766.070,98	255.084.070,99	255.084.070,99	255.084.070,99

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1	Dokumen	112.126.000,00	112.126.000,00	112.126.000,00	112.126.000,00
2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu Kewenangan Provinsi	14	Kegiatan	202.640.070,98	142.958.071,00	142.958.070,99	142.958.070,99
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	1	Dokumen	478.633.500,00	367.490.500,00	367.490.500,00	442.490.500,00
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30	Orang	121.638.500,00	73.038.500,00	73.038.500,00	73.038.500,00
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30	Orang	356.995.000,00	294.452.000,00	294.452.000,00	369.452.000,00
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,25	Indeks	535.049.574,00	382.897.074,00	360.827.792,00	252.711.112,00
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	Dokumen	34.807.869,00	9.002.869,00	9.002.869,00	9.002.869,00
2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	Dokumen	34.807.869,00	9.002.869,00	9.002.869,00	9.002.869,00
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen hasil Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1	Dokumen	34.807.869,00	9.002.869,00	9.002.869,00	9.002.869,00
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8	%	218.813.277,00	218.813.277,00	208.474.335,00	208.474.335,00

KODE REKENING	URUSAN PEMERINTAH/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKATOR KINERJA	PAGU AWAL/MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN		
						PAGU MENDAHULUI PERUBAHAN (Rp)	KE - 1 (Rp)	KE - 2 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dokumen hasil pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	1	Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.14.03.1.01.0010	Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder rs dan mitra kerja dalam pelaksanaan an advokasi, promosi dan KIE program Bangsa Kencana	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	1	Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1	Dokumen	18.813.277,00	18.813.277,00	8.474.335,00	8.474.335,00
2.14.03.1.02.0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	30	Organisasi	18.813.277,00	18.813.277,00	8.474.335,00	8.474.335,00
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	64,55	%	281.428.428,00	155.080.928,00	143.350.588,00	35.233.908,00
2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen hasil pelaksanaan pelaksanaan design program pembangunan keluarga	1	Dokumen	281.428.428,00	155.080.928,00	143.350.588,00	35.233.908,00
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	1	Dokumen	281.428.428,00	155.080.928,00	143.350.588,00	35.233.908,00
			TOTAL					

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2025

3.1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA RENJA TAHUN 2025

Evaluasi capaian kinerja Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renja dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Pelaksanaan Renja Tahun 2025 merupakan penjabaran dari rencana strategis perangkat daerah serta selaras dengan kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang lebih tinggi.

Proses evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dengan realisasi capaian yang diperoleh pada akhir tahun. Melalui perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi program atau kegiatan yang telah mencapai target maupun yang masih memerlukan peningkatan kinerja. Selain menilai tingkat pencapaian indikator kinerja, evaluasi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari aspek internal organisasi, seperti ketersediaan sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta koordinasi antar unit kerja, maupun dari faktor eksternal yang berada di luar kendali perangkat daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja Renja Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang sistematis dan terukur, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan efisien. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya akan disusun berbagai rekomendasi dan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses perencanaan serta pelaksanaan program pada tahun-tahun berikutnya.

FORMULIR E.55

Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah DINAS P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Periode Pelaksanaan : 2025

Indikator dan target kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Tengah

- | | 1996 | 2000 | 2004 | 2008 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. Indeks Pembangunan Gender (IDG) | 81,96 | 81,96 | 81,96 | 81,96 |
| 2. Persentase ARB pada lapangan APBD | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| 3. Persentase Kesenjangan Antara Kelakasan dan TPO yang Mendapatkan Layanan K 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
| 4. Indeks Perumahan Awak (IPA) | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 |
| 5. Persentase Anak Menderita pertiduran Nhaus yang mendapatkan layanan krm 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 6. Indeks Pembangunan Keluarga (ibangla) | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 7. Angka kelahiran / conditional fertility Rate (TFR) | 44,55 | 44,55 | 44,55 | 44,55 |
| 8. Angka Prevalensi Kontracepsi Modern / modern Contraceptive (mPCF) | 74,76 | 74,76 | 74,76 | 74,76 |
| 9. Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| 10. Angka Kelahiran remaja umur 15-20 tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR) | 16 | 16 | 16 | 16 |

[illegible]

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ YK/ Output)		I		II		III		IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi Provinsi s/d 2025 (akhir Tahun 2025)	Unit Pengukuran				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	Meningkatkan Kualitas Gender dan Partisipasi Perempuan	PROGRAM PENGABDIAN/UMAH GENDER DAN PEMEROLAHAN PERUMAHAN	40	1.405.314.023,00	35	831.081.860,00	40	1.482.618.779,02	0	23.610.000,00	0	652.181.430,00	35	780.027.750,00	70	2.336.266.040,00	87,5	99,50
		Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Kemuningrejo	1	294.3.91.336,50	1	156.954.998,00	1	144.090.381,02	1	15.385.000,00	0	23.610.000,00	1	67.497.550,00	2	338.208.698,00	100	98,73
		Salah satu kegiatan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	30	105.297.112,17	25	71.904.400,00	30	38.145.610,00	0	1.013.000,00	0	10.920.000,00	25	660.000,00	50	108.923.450,00	180	97,05
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	30	105.297.112,17	9	71.904.400,00	10	18.372.000,00	3	18.372.000,00	3	12.690.000,00	3	7.335.100,00	27	160.295.250,00	270	99,89
		Alokasi kegiatan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kecamatan	1	83.797.112,17	1	52.149.448,00	1	17.489.760,02	0	-	0	-	1	16.837.550,00	1	68.886.998,00	100	96,49
		Dokumen Pelikasan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1	1.178.625.574,33	1	598.947.312,00	1	1.324.234.986,00	0	-	0	620.400.280,00	1	698.248.350,00	2	1.917.995.942,00	100	99,58
		Bononi pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kecamatan Kemuningrejo	5	994.297.112,17	30	394.411.170,00	5	1.258.014.000,00	0	-	0	620.400.280,00	5	633.324.100,00	35	1.648.135.550,00	100	99,66
		Sosialisasi/Pengaturan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	3	134.328.462,17	3	204.536.142,00	3	66.229.936,00	0	-	0	-	3	64.924.250,00	6	269.460.392,00	100	98,04
		Pengaturan dan Pengembangan Lembara Penyedia Layanan Kewenangan Perempuan	1	72.297.112,17	1	36.179.550,00	1	14.293.360,00	0	-	0	-	1	14.281.850,00	2	50.461.400,00	100	99,92
		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Kewenangan Perempuan	35	72.297.112,17	30	36.179.550,00	35	14.293.360,00	0	-	0	-	30	14.281.850,00	60	50.461.400,00	85,71	99,92
		Pembinaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Kemuningrejo	92,5	833.165.173,00	90	519.785.557,00	92,5	423.025.585,00	100	37.467.400,00	100	91.810.899,00	100	158.885.412,00	400	930.965.268,00	432,43	97,20
		Dokumen Pelikasan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1	422.553.884,00	1	168.737.222,00	1	54.811.533,00	0	10.067.000,00	0	-	1	54.223.600,00	2	222.980.022,00	100,00	98,92
		Pemenuhan Yang Melibatkan Para Pihak	11	68.000.092,00	9	50.331.500,00	11	8.994.036,00	0	-	0	-	9	8.960.000,00	18	59.291.800,00	81,82	99,62
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	11	394.459.092,00	9	118.425.522,00	11	45.819.456,00	0	10.067.000,00	0	-	9	24.860.700,00	18	168.689.122,00	81,82	98,79
		Dokumen Pelikasan Layanan korban kekerasan	1	265.455.761,00	1	228.724.435,00	1	247.668.000,00	0	27.231.500,00	0	55.162.100,00	1	117.715.212,00	2	468.797.246,00	100,00	96,93
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengabdian	12	154.796.669,00	50	135.813.904,00	12	86.000.000,00	0	9.796.100,00	0	12.457.000,00	154	32.275.812,00	204	214.221.711,00	128,13	91,17
		Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kecamatan Kemuningrejo	1	110.659.092,00	85	92.910.131,00	1	161.668.000,00	0	17.435.400,00	0	42.704.800,00	100	85.439.400,00	100	161.665.400,00	100,00	99,99
		Bantuan keuangan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	1	105.544.228,00	1	122.304.400,00	1	120.545.050,00	0	-	0	-	1	116.892.500,00	2	239.197.100,00	100,00	96,97
		Lembara Penyedia Layanan Kewenangan Perempuan	60	120.615.136,00	25	101.029.000,00	60	101.029.000,00	0	-	0	-	25	101.027.800,00	50	203.126.700,00	41,67	100,00
		Peningkatan kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan kewenangan perempuan	2	45.139.092,00	100	201.051.700,00	2	19.516.050,00	0	-	0	-	100	7.049.500,00	200	35.970.400,00	50,00	81,29
		Penyediaan kebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Ruang Publik	50	185.543.129,00	45	246.632.000,00	50	185.543.129,00	0	-	0	-	30	5.570.000,00	75	246.202.500,00	60,00	3,03
		PROGRAM PENGABDIAN/UMAH GENDER DAN PEMEROLAHAN PERUMAHAN	1	87.396.439,50	12	71.364.700,00	1	87.396.439,50	0	-	0	-	12	5.570.000,00	24	76.934.700,00	120,00	6,37
		Peningkatan Kualitas Kelangka dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	13	87.396.439,50	1	71.364.700,00	13	87.396.439,50	0	-	0	-	1	5.570.000,00	2	76.934.700,00	7,69	6,37
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak	1	96.146.689,50	1	168.267.800,00	1	96.146.689,50	0	-	0	-	0	-	1	168.267.800,00	0,00	-
		Peningkatan kesadaran masyarakat perempuan dan anak mengenai hak-hak mereka	1	96.146.689,50	1	168.267.800,00	1	96.146.689,50	0	-	0	-	0	-	1	168.267.800,00	0,00	-
		Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	14	254.255.425,00	13	199.676.790,00	14	254.255.425,00	0	-	0	-	10	47.935.500,00	23	256.387.140,00	71,43	22,27
		Peningkatan Kualitas dan Partisipasi Perempuan dan Anak dalam Kemampuan Data di Tingkat Daerah Provinsi	1	254.255.425,00	1	199.676.790,00	1	254.255.425,00	0	-	0	-	1	47.935.500,00	2	256.387.140,00	100,00	22,27
		Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	2	85.323.112,50	1	53.417.900,00	2	85.323.112,50	0	-	0	-	1	7.245.000,00	2	65.833.540,00	50,00	14,55
		Penyajian dan Pemantauan Data Gender dan Anak dalam Kemampuan Data Provinsi	1	168.930.212,50	1	146.269.600,00	1	168.930.212,50	0	-	0	-	1	44.154.000,00	2	190.453.600,00	100,00	26,16
		PROGRAM PENGABDIAN/UMAH GENDER DAN PEMEROLAHAN PERUMAHAN	12	417.937.696,00	14	635.137.435,00	12	158.693.428,00	0	4.147.250,00	0	4.147.250,00	14	47.377.000,00	28	790.738.951,00	116,67	98,11
		Pembinaan PUG pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan Kemuningrejo	85,7	219.414.813,00	50	281.356.429,00	86,71	85.937.561,00	0	4.147.250,00	0	18.580.000,00	71,4286	62.470.466,00	121,429	366.544.144,00	83,34	99,14
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	30	105.297.112,17	9	71.904.400,00	10	18.372.000,00	3	18.372.000,00	3	12.690.000,00	3	7.335.100,00	27	160.295.250,00	270	99,89
		Alokasi kegiatan dan pendampingan penyelenggaraan PUG Kecamatan	1	131.942.731,50	25	257.416.728,00	1	60.194.366,00	0	-	0	12.280.000,00	25	47.360.466,00	50	317.057.191,00	250,00	99,08
		Dokumen Pelikasan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1	209.322.883,00	1	353.761.007,00	1	72.666.667,00	0	-	0	-	1	41.066.800,00	2	424.184.807,00	100,00	96,89
		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	1	79.925.801,50	30	104.140.072,00	1	68.818.858,00	0	-	0	-	30	38.321.800,00	60	171.258.872,00	300,00	97,53
		Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	120.427.081,50	1	249.640.915,00	1	3.847.250,00	0	-	0	-	1	3.285.000,00	2	252.925.915,00	100,00	85,39
		Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan pengabdian masyarakat kepada lembaga penyedia layanan kewenangan provinsi	65	673.414.311,00	60	961.692.357,00	65	697.274.579,99	65	46.176.900,00	65	212.303.120,00	65	313.431.780,00	260	1.450.854.157,00	400,00	98,79
		PROGRAM PENGABDIAN/UMAH GENDER DAN PEMEROLAHAN PERUMAHAN	1	124.066.366,07	1	471.098.157,00	1	255.084.070,99	0	-	0	16.118.000,00	1	133.644.800,00	2	774.524.157,00	100,00	99,35
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1	124.066.366,07	1	124.066.366,07	1	124.066.366,07	0	-	0	-	1	112.126.000,00	2	203.760.600,00	100,00	99,99
		Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat perempuan dan anak mengenai hak-hak mereka	0	-	14	379.483.557,00	14	142.958.070,99	0	-	0	-	14	86.638.080,00	28	520.763.557,00	100,00	98,85
		Dokumen Pelikasan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perempuan dan Anak	1	549.374.944,33	1	495.594.200,00	1	442.490.500,00	0	46.176.900,00	0	82.733.900,00	1	109.157.280,00	1	966.330.600,00	100,00	98,47
		Penyediaan Layanan Pengabdian Masyarakat bagi Anak yang Berkebutuhan Khusus	1	149.518.366,07	30	123.122.000,00	30	123.122.000,00	0	-	0	-	301	73.756.000,00	311	984.341.900,00	100,33	99,57
		Memfasilitasi Pendidikan Fokus Kewenangan Provinsi	1	398.856.577,67	30	369.072.100,00	30	369.072.100,00	10	23.363.000,00	10	62.957.700,00	30	188.292.800,00	60	732.087.000,00	200,00	98,26
		URUSAN PEMBIYARAN BANGUN PENCANAAN PENCUKUT	1,96	502.414.586,00	2,28	828.123.844,00	1,96	292.711.111,00	2,24	3.694.250,00	2,24	187.864.586,00	2,25	54.802.750,00	2,24	1.073.865.949,00	114,29	97,29
		Program dan Sinkronisasi Kualitas Perempuan dan Anak dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengabdian	1	231.26.065,00	1	148.466.176,00	1	9.002.860,00	0	-	0	-	1	5.241.600,00	2	152.382.026,00	100,00	99,26
		Kuantitas Penduduk	1	231.26.065,00	1	148.466.176,00	1	9.002.860,00	0	-	0	-	1	5.241.600,00	2	152.382.026,00	100,00	99,26

3.2. FAKTOR PENDORONG

Keberhasilan pencapaian target dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025 tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung yang memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan. Faktor-faktor tersebut berperan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta mendorong tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor pendorong dalam pencapaian Renja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah yang memberikan arah dan prioritas yang jelas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Ketersediaan anggaran yang memadai sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.
3. Komitmen dan koordinasi yang baik antar unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan efisien.
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Partisipasi dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari masyarakat maupun instansi terkait, dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

Faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam mendorong tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025.

3.3. EVALUASI PENGHAMBAT

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renja Tahun 2025, masih terdapat beberapa kendala dan hambatan yang mempengaruhi tingkat pencapaian target kinerja. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap berbagai faktor penghambat tersebut agar dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program pada periode berikutnya. Adapun beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Keterbatasan anggaran yang menyebabkan beberapa program atau kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Kendala dalam koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait, yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.
4. Perubahan kebijakan atau regulasi yang berdampak pada penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Keberadaan faktor-faktor tersebut menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pencapaian beberapa indikator kinerja dalam Renja Tahun 2025.

3.4. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN FAKTOR PENGHAMBAT

Untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025, diperlukan langkah-langkah tindak lanjut yang strategis dan terencana agar pelaksanaan program dan kegiatan pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan optimal. Tindak lanjut ini dilakukan sebagai upaya perbaikan terhadap berbagai kendala yang telah diidentifikasi dalam proses evaluasi. Adapun beberapa langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan peningkatan pemahaman terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan prioritas pembangunan.
3. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antar unit kerja maupun instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Melakukan penyesuaian terhadap perencanaan program dan kegiatan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan di lapangan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia serta meningkatkan dukungan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut tersebut diharapkan berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Renja Tahun 2025 dapat diminimalkan, sehingga pencapaian kinerja perangkat daerah pada periode perencanaan berikutnya dapat lebih optimal.

BAB IV PENUTUP

4.1. TINGKAT CAPAIAN KINERJA RENJA TAHUN 2025

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Tahun 2025, secara umum tingkat capaian kinerja program dan kegiatan menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebagian besar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun pencapaian indikator kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan yang telah dilakukan dapat menjadi pedoman yang cukup efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah.

Namun demikian, masih terdapat beberapa program dan kegiatan yang pencapaiannya belum optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran, maupun faktor eksternal seperti perubahan kebijakan serta dinamika kondisi di lapangan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan Renja Tahun 2025 telah memberikan kontribusi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja ini menjadi penting sebagai bahan refleksi dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan pada periode perencanaan berikutnya agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4.2. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT PERENCANAAN BERIKUTNYA

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan cukup baik dan mampu mendukung pencapaian sasaran kinerja perangkat daerah. Keberhasilan tersebut didukung oleh adanya komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program serta dukungan kebijakan dan koordinasi yang baik antar unit kerja. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program ke depan.

Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, perangkat daerah perlu melakukan beberapa langkah perbaikan dalam perencanaan tahun berikutnya, antara lain melalui penyempurnaan perencanaan program dan kegiatan agar lebih realistis dan terukur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar pihak terkait, serta

optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan program pada periode berikutnya dapat berjalan lebih efektif serta mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.